

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KEGIATAN FINALISASI *ROAD MAP SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan Kegiatan Finalisasi *Road Map Sustainable Public Procurement*, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kegiatan Finalisasi *Road Map Sustainable Public Procurement*;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kegiatan Finalisasi *Road Map Sustainable Public Procurement*;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);  
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN FINALISASI *ROAD MAP SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*.
- KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Finalisasi *Road Map Sustainable Public Procurement* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menetapkan rencana tindak lanjut kegiatan;
  - mengumpulkan data dan informasi terkait kajian;
  - menyusun kerangka Kegiatan Finalisasi *Road Map Sustainable Public Procurement*;
  - memberikan masukan dan tanggapan terkait Kegiatan Finalisasi *Road Map Sustainable Public Procurement*;
  - menyusun laporan pendahuluan; dan
  - menyusun laporan akhir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Finalisasi *Road Map Sustainable Public Procurement* diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
KEGIATAN FINALISASI ROAD  
MAP SUSTAINABLE PUBLIC  
PROCUREMENT

NOMOR : 21 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM KEGIATAN FINALISASI ROAD MAP SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	:	1. Zulhenny 2. Dudi Gardesi Asikin 3. Januar Indra 4. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 5. Indah Suci Pratiwi 6. Deasy Rachmawati 7. Sarah Arlina 8. Reza Alwan Affandi 9. Ria Ayuningrum 10. Cecep Hendar Supriadi 11. Wening Dyah Capriani HD 12. Meylina Putri Fabisari 13. Agita Marelia Ulfa 14. Mustika Rosalina Putri 15. Nurmayanti (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17. Ersya Herwinda (Kementerian PPN/Bappenas) 18. Luciawati Sunarjo (Kementerian Perindustrian)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO